

PERANAN JASA KONSTRUKSI PADA SEKTOR EKONOMI DI KABUPATEN MAGETAN

Rr Retno Kusumastuti
Universitas Doktor Nugroho Magetan
Magetan, Indonesia
E-mail: retnokusuma@gmail.com

Abstrak----Pertumbuhan pembangunan di Indonesia membuat salah satu kota yang Berada Di Propinsi Jawa Timur yaitu Kota Magetan giat dalam meningkatkan pembangunan. Pengembangan bangunan gedung yang sedang banyak dilakukan pada zaman sekarang adalah gedung bertingkat, termasuk salah satunya yaitu Gedung PEMDA.

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kelayakan gedung menggunakan software ETABS dan mengacu pada spesifikasi-spesifikasi yang telah ditentukan dalam SNI 2847:2013, SNI 1726:2012, SNI 1727:2013 dan PPURG 1987.

Hasil output berupa momen lentur, geser dan aksial pada ETABS akan dianalisis kelayakannya. Bangunan 6 lantai dengan fungsi sebagai gedung pemda yang mempunyai luas bangunan 16500 m² menggunakan dimensi balok 40x70 cm, 30x60 cm, 25x50 cm, 20x40 cm, dimensi kolom, 60x60 cm, 50x50 cm, 40x40 cm, pelat lantai tebal 120 cm dengan pelat basement 15 cm, dan pondasi tiang pancang setelah dilakukan analisis secara keseluruhan, struktur tersebut aman atau layak digunakan sesuai standar perencanaan yang berlaku.

Kata Kunci. Konstruksi, Ekonomi, Peranan Jasa

I. PENDAHULUAN

Air merupakan unsur yang vital dalam kehidupan manusia. Seseorang tidak dapat bertahan hidup tanpa air, karena itulah air merupakan salah satu penopang hidup bagi manusia. Tubuh manusia sangat membutuhkan air untuk dikonsumsi agar mampu menjaga fungsi ginjal. Air juga menjadi kebutuhan dalam setiap rumah tangga, kegiatan pertanian, ekonomi, dan industri. Oleh karena itu, air perlu ditata penggunaannya agar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Air merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan, termasuk di dalamnya air dan sanitasi, kesehatan, dan pertanian. Hal terpenting dalam setiap kebijakan pembangunan mengenai pengelolaan air adalah bahwa air berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sumber daya air yang dimulai dari kebijakan pemerintah tentang air, seperti bagaimana menyediakan air bersih bagi masyarakat dan pembangunan sistem irigasi yang memiliki asas adil dan merata. Secara yuridis dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yaitu :“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam pasal tersebut jelas bahwa air harus dikelola dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah sehingga manfaat air dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Sumber daya air merupakan kebutuhan mutlak setiap individu yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Apabila terjadi pengurangan kuantitas maupun kualitas sumber daya air maka akan mempengaruhi kehidupan manusia secara bermakna. Kecenderungan saat musim kemarau tiba di beberapa daerah di Indonesia mengalami krisis air bersih.

Fenomena kekurangan air bersih ini melanda daerah Bantul, Yogyakarta. Setiap tahun saat musim kemarau tiba debit air di sumur dan sumber mata air di wilayah Bantul mulai berkurang. Warga yang mengalami kekurangan air bersih ialah warga di Dusun Nogosari, Desa Selopamioro, Imogiri, Bantul. Mereka bertempat tinggal di daerah dataran tinggi ini mengalami kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari seperti, mandi, makan, masak, minum, mencuci, serta kebutuhan warga setempat lainnya. Oleh karena itu, para warga pun harus rela menempuh perjalanan sejauh dua kilometer untuk mendapatkan air bersih (<http://digilib-ampl.net> diakses pada 20 Nopember 2009).

Selain Bantul, Yogyakarta kekurangan air bersih saat musim kemarau juga dialami sebagian wilayah di Jawa Timur seperti di daerah Bojonegoro, Pasuruan dan Magetan.

Data yang berhasil dihimpun www.beritajatim.com diakses pada 30 Desember 2009, menyebutkan :

“Kesulitan air di Kabupaten Bojonegoro bisa terus bertambah, karena kemarau kemungkinan akan baru berhenti akhir Oktober atau awal Nopember 2009. Sejauh ini, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Bojonegoro telah mendapat laporan 60 desa di 18 kecamatan. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 46 desa di 17 kecamatan. Kemungkinan besar, semakin sulitnya air bersih didapat, karena memang resapan di hutan semakin berkurang. Salah satu desa yang cukup parah kekurangan air bersih adalah di Desa Geger, Kecamatan Kedungadem. Bahkan, anakanak, remaja sampai orang dewasa harus berebut saat mobil tanki pembawa air milik Pemkab Bojonegoro datang ke desa setempat.” Beberapa kecamatan di daerah Bojonegoro juga mengalami kekurangan air bersih saat musim kemarau tiba. Bahkan jumlah kecamatan yang mengalami kekurangan air bersih kini bertambah banyak. Fenomena yang sama juga terlihat di Pasuruan. Hal ini seperti yang diberitakan dalam www.tempointeraktif.com diakses pada 30 Desember 2009, menyatakan bahwa : “Warga tiga desa di Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mengalami krisis air bersih sejak musim kemarau ini. Sekitar 7.000 jiwa warga di Desa Sibon, Desa Lemahbang, dan Desa Tambakrejo terkena dampak krisis air. Sumber mata air Galih yang menjadi andalan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan memasak dan mencuci mengering karena kemarau panjang”. Problem kesulitan mendapatkan air bersih tidak hanya melanda Bantul, Yogyakarta, Bojonegoro,

Pasuruan, tetapi juga melanda warga di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Musim kemarau yang berkepanjangan di wilayah Magetan menyebabkan kesulitan air bersih terutama di wilayah Magetan Selatan seperti wilayah Kecamatan Parang, Lembeyan dan Ngariboyo. Selain itu, kesulitan mendapatkan air bersih kini semakin meluas dan melanda warga di Desa Bogem, Kecamatan Sukomoro.

Hal ini dijelaskan dalam www.radarmadiun.co.id diakses pada 29 Oktober 2009, menyatakan bahwa : “Dampak musim kemarau mulai dirasakan warga yang berada di pinggiran Kabupaten Magetan. Seperti dialami warga di Desa Bendo, Kecamatan Bendo. Mereka yang selama ini selalu mengandalkan jaringan air minum melalui pipa PDAM, mulai kesulitan. Sebab, sudah sebulan ini air pipa PDAM macet. Akibatnya warga untuk memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari terpaksa memanfaatkan air sungai. Kendati kondisinya kotor dan keruh”. Para warga di desa tersebut terpaksa mengangkut air yang berasal dari sungai tersebut untuk mereka bawa ke rumah meskipun kondisinya tidak dapat dikatakan bersih bila digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masalah kekurangan air bersih yang dialami pada beberapa daerah di Kabupaten Magetan saat musim kemarau tiba harus segera ditanggapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan. Seperti kita ketahui bahwa kebutuhan dalam hal air merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat dalam kehidupan. Untuk melindungi segala bentuk pemanfaatan sumber daya air maka pemerintah membuat undang-undang yang mengatur mengenai prioritas pemanfaatan sumber daya air. Sebagai acuan di dalam pemanfaatan sumber daya air ini adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Guna Air. Di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Guna Air ini menyatakan urutan prioritas penggunaan air, yaitu :

1. Air untuk minum
2. Air untuk keperluan rumah tangga
3. Air untuk kepentingan pertahanan dan keamanan
4. Air untuk kepentingan peribadatan

5. Air untuk kepentingan irigasi Seperti yang telah disebutkan di atas maka penggunaan air yang paling prioritas adalah untuk kebutuhan minum bagi masyarakat. PDAM Kabupaten Magetan sebagai salah satu instansi pemerintah berbentuk BUMD yang menyelenggarakan pelayanan umum/jasa dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih dalam hal ini air untuk kebutuhan minum, memasak, mencuci, mandi bagi masyarakat. Sebagian besar kebutuhan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Magetan dilayani oleh PDAM. Data yang diperoleh mengenai cakupan pelayanan PDAM Tahun 2009 adalah 60,06% dari jumlah penduduk di Kabupaten Magetan yaitu 695.343 jiwa (Data Bagian Langganan).

PDAM Kabupaten Magetan menggunakan mata air dan air tanah sebagai sumber air baku dalam sistem penyediaan air minum bagi masyarakat. Data yang diperoleh dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PJMD) Tahun 2009-2014 Kabupaten Magetan menyebutkan ketersediaan air di bumi seperti air permukaan dan air tanah tersebut keberadaannya dipengaruhi oleh iklim, jenis/sifat batuan dan kondisi permukaan tanah, dan tata guna lahan. Kondisi hidrologi Kabupaten Magetan dipengaruhi oleh sifat iklim regional, disamping sifat-sifat fisis wilayah/tanah, hutan, dan lingkungan. Kabupaten Magetan dengan luas wilayah sebesar 688,85 km² setidaknya memiliki sumber mata air sebanyak 197 titik dengan debit sekitar 3.517 liter per detik pada Tahun 2004 dan mengalami penurunan menjadi 2.555,8 liter per detik pada Tahun 2007 (RPJMD Tahun 2009-2014 Kabupaten Magetan).

Penurunan debit mata air ini perlu mendapat perhatian lebih mengingat kebutuhan akan air bersih akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Magetan. Hal ini menggambarkan kondisi yang kurang mendukung bagi Kabupaten Magetan dalam usaha pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Salah satu penyebab menurunnya debit mata air ini dapat terjadi akibat adanya kerusakan lingkungan di wilayah tangkapan air di sekitar sumber mata air dan terjadi alih fungsi lahan hutan kayu menjadi lahan pertanian tanaman pangan, permukiman dan aktivitas guna lahan lainnya. Konversi atau perubahan guna lahan di wilayah tangkapan air tersebut dapat menyebabkan kemampuan menyerap air hujan menjadi menurun dimana air hujan merupakan salah satu sumber pasokan utama dari ketersediaan air tanah. Pelayanan yang diberikan PDAM akan terhambat karena sumber air yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih ke masyarakat juga semakin berkurang. Faktor penghambat lain adalah PDAM Kabupaten Magetan memiliki tingkat kehilangan air yang masih cukup tinggi yaitu sekitar 38,2% di jalur transmisi dan distribusi menjadi penghalang pemenuhan kebutuhan air bersih ke masyarakat (Data Bagian Transmisi Distribusi dan Produksi).

Angka yang masih cukup tinggi dari batas normal yaitu 20 % dari rata-rata nasional. Hal ini disebabkan kondisi jaringan distribusi yang umurnya lebih dari 20 tahun. Selain memiliki hambatan-hambatan dalam usaha pemenuhan kebutuhan air bersih ke masyarakat PDAM Kabupaten Magetan juga memiliki beberapa peluang. Adanya dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Magetan baik dalam bentuk peraturan Perundangundangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun dukungan kenaikan tarif dasar air dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat merupakan peluang yang dimiliki PDAM. Hal-hal itulah yang menjadi penunjang pemenuhan kebutuhan air bersih oleh PDAM Kabupaten Magetan ke masyarakat. Berdasarkan kondisi lingkungan yang dihadapi PDAM Kabupaten Magetan maka dibutuhkan suatu perencanaan strategis.

Penyusunan rencana strategis oleh PDAM Kabupaten Magetan diharapkan mampu merespon segala kondisi lingkungan yang ada terutama dalam permasalahan penyediaan kebutuhan air bersih di Kabupaten Magetan. Rencana strategis bagi PDAM Kabupaten Magetan

dimana sebagai salah satu instansi pemerintah berbentuk BUMD bertumpu pada dasar pemikiran bahwa pemimpin dan manajer organisasi harus mampu menjadi ahli strategi yang efektif untuk menanggulangi keadaan yang telah dan sedang berubah. Selain itu, mereka harus mengembangkan landasan yang relevan dan kokoh bagi pembuatan keputusan apabila PDAM Kabupaten Magetan ingin mencapai visi dan misinya serta mencapai tujuan di masa depan.

Dari proses itulah peran perencanaan strategis sangat penting bagi organisasi pemerintah karena di sini keterlibatan pimpinan terlihat jelas dalam mengkoordinasikan para bawahannya dari berbagai unit kerja. Sebagai pemimpin dan manajer organisasi harus mampu mengarahkan apa yang harus segera dilaksanakan dalam menghadapi perubahan lingkungan. Perencanaan strategis membantu para pemimpin dan manajer organisasi untuk bertindak dan berpikir strategis. Maka dari itu untuk merespon semua ini maka PDAM Kabupaten Magetan dituntut untuk dapat melakukan perencanaan strategis yang tepat sehingga dapat memenangkan persaingan. Dengan memahami perubahan lingkungan perusahaan yang terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi akan dapat tumbuh dan berkembang. Sebaliknya perusahaan yang tidak beradaptasi dengan perubahan lingkungan akan mengalami kemunduran. Berangkat dari situlah yang mendorong peneliti ingin mengetahui perencanaan strategis dan strategi-strategi yang digunakan pada PDAM Kabupaten Magetan dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih.

II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan di atas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif yang didukung dengan data kualitatif. Penelitian mengenai strategi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magetan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih ini mengambil lokasi di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magetan. Dokumen dan arsip yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai literatur-literatur baik buku, media massa (cetak ataupun elektronik) ataupun jurnal-jurnal ilmiah yang tentunya relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi sebagai alat pengumpul data. Validitas data menunjukkan sejauh mana kualitas data dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, untuk mendapatkan validitas data dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah triangulasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif, yang terdiri dari tiga komponen analisis data, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi

III HASILDANPEMBAHASAN

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang digunakan PDAM Kabupaten Magetan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.

Maka dari itu dilakukan Analisis Lingkungan PDAM Kabupaten Magetan berupa Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal:

A. Lingkungan Internal

Lingkungan internal merupakan situasi dan kondisi dalam organisasi yang saling mempengaruhi serta terkait dengan misi, mandat, tugas dan fungsi organisasi tersebut dalam rangka pencapaian tugas organisasi. Sedangkan analisa terhadap lingkungan internal PDAM bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan PDAM yang merupakan aspek-aspek yang membantu dan merintangai pencapaian misi dan pemenuhan mandatnya.

1. KEKUATAN

Adanya Pedoman Penilaian Kerja Pedoman penilaian kerja ini merupakan suatu pedoman yang harus diterapkan oleh para pegawai sebagai bentuk penilaian terhadap kerja yang telah dilakukan selama satu tahun. Jika dalam penilaian kerja memiliki nilai rata-rata baik maka akan ada kenaikan gaji secara berkala. Hal tersebut telah diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2007. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Sugianto, Bsc selaku Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian: “Pedoman penilaian kerja para pegawai sudah dipedomani karena memang setiap tahun kita mengevaluasi kinerja pegawai untuk melihat sejauh mana pegawai itu mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu salah satunya untuk nilai sejauh mana kualitas kinerja pegawai.” (wawancara, 8 Mei 2010) Hal ini senada seperti yang diungkapkan oleh Dra. Tutik Wahyuti, MM selaku Direktur Umum dan Keuangan: “Pedoman penilaian kerja itu ada yang namanya daftar penilaian pegawai. Itu dilaksanakan setiap tahun mulai dari karyawan sampai direksi. Itu terdiri dari kedisiplinan, kesetiaan, loyalitas, kepemimpinan, inovasi, dedikasi. Dan pedomannya itu baku antara pegawai negeri dan perusahaan itu sama.” (wawancara, 8 Mei 2010) Dari uraian diatas mengenai Pedoman Penilaian Kerja pegawai PDAM Kabupaten Magetan sudah melaksanakan dengan baik dan dievaluasi setiap akhir tahun. Dengan adanya pedoman penilaian kerja yang telah dijalankan dengan baik maka ini menjadi kekuatan bagi PDAM. 79

2. Kondisi Keuangan Cukup Baik

a. Tersedianya sumber keuangan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, pendapatan asli PDAM Dalam menjalankan program kerjanya, PDAM Kabupaten Magetan perlu berbagai faktor pendukung diantaranya adalah sumber daya keuangan. Sumber keuangan yang diperoleh PDAM Kabupaten

Magetan yang berasal dari APBD, APBN, penjualan air dan non air . Hal ini dikemukakan oleh Drs.Ec. Rahmadi Utomo selaku Kepala Bagian Keuangan :“Sumber keuangan operasional didapat dari pelanggan, itu dari penjualan air. Jika sumber keuangan permodalan untuk membiayai seluruh operasional untuk membiayai investasi yang membutuhkan biaya kecil kita bisa menggunakan biaya sendiri sedangkan pembiayaan yang besar kita bisa sharing ke pemkab. Jika ternyata masih kurang kita ajukan ke APBN juga. Memang kita sudah ada pembagian pembiayaan. Jiika kita ingin ambil air dari sumber dengan pengadaan pipa-pipa besar kita ajukan ke APBN missal kita ini lagi ada program pengadaan air dengan pemasangan pipa besar dari Sumber Ondo-ondo. Kalo menarik air dari tandon ke masyarakat bisa dari PDAM atau jika pemkab ada program kita bisa sharing dana ke pemkab.”(wawancara, 17 April 2010)

Hal senada juga diungkapkan oleh Dra. Tutik Wahyuti, MM selaku Direktur Umum dan Keuangan :

“Kalo pembiayaan operasional kita dari pelanggan. Kita tugas utamanya menyalurkan air bersih. Di luar itu ada kegiatan penambahan sambungan baru, kemudian juga ada dari denda pelanggan terus ada juga yang dari bunga bank. Ada juga bantuan dari pemerintah seperti APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten itu untuk kegiatan pengembangan misal pembangunan sarana air bersih, pengembangan debit air, untuk menambah jaringan tapi untuk operasional itu full dari PDAM sendiri.” (wawancara, 8 Mei 2010).

b. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Dilaksanakan Dengan Baik.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan merupakan rangkaian rencana kerja perusahaan setiap tahun beserta rincian anggaran yang dibutuhkan. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) terlaksana dengan baik. Pada setiap tahun disusun dan dievaluasi pelaksanaannya. RKAP Kabupaten Magetan selama ini telah dilaksanakan dengan baik setiap tahun dan telah mendapat pengawasan dari BPKP, BPK, Pemda sebagai bentuk pertanggungjawaban PDAM selama ini. Hal senada diungkapkan oleh Drs. Rahmadi Utomo selaku Kepala Bagian Keuangan :

“RKAP itu kayak RPJMD kalo di Pemda. Setiap tahun kita memang menyusunnya karena itu dasar kita melaksanakan program yak an di situ juga ada rincian program-program yang harus kita kerjakan selama setahun dan juga ada rincian dananya. Selama ini kita sudah melaksanakannya dan pasri pada akhir tahun kita diperiksa oleh BPKP” (wawancara, 8 Mei 2010)

3. KELEMAHAN

a. Struktur Organisasi Masih Belum Memadai

Penilaian terhadap struktur organisasi PDAM dilihat dari tiga hal yaitu: kewenangan pengambilan keputusan, arus kerja dan rentang pengawasan.

1.1. Pertama, kewenangan pengambilan keputusan berdasarkan struktur organisasi tersentralisasi pada Direktur Utama tetapi dalam proses pengambilan keputusan Direktur Utama tetap melibatkan Direktur dibawahnya dan para Kepala Bagian.

1.2. Kedua, arus kerja. Dalam bagan struktur organisasi PDAM, Direktur Utama benar-benar bekerja membawahi Direktur Bidang Umum dan Keuangan dan Direktur Bidang Teknik, Kepala Bagian, Sub Bagian dan mereka bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Direktur Bidang bekerja membawahi Kepala Bagian dan Kepala Bagian membawahi Sub Bagian dan Sub Bagian membawahi staf-staf sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. hal ini terlihat dari adanya garis komando yang tegas antara Direktur Utama dengan Direktur Bidang maupun dengan Kepala Bagian dan Sub Bagian. Selain itu PDAM Kabupaten Magetan memiliki Dewan Pengawas yang bertugas mengawasi jalannya perusahaan dan Direksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Sedangkan Unit-Unit yang dimiliki PDAM setiap kepala unit membawahi seksi-seksi dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Arus kerja ini dapat dilihat dari Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Magetan Nomor 74 tahun 1992 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Ketiga, rentang pengawasan. Dilihat dari struktur organisasi PDAM yang lebih melebar dan memanjang maka rentang pengawasannya menjadi lebih luas pada sejumlah besar pegawai. Akan tetapi, struktur organisasi yang ada sekarang belum memadai. Hal ini disebabkan adanya perubahan pimpinan baru dan strategi baru. Oleh karena itu, dengan struktur organisasi yang ada saat ini harus berbenah menyesuaikan strategi yang baru. Dalam struktur organisasi yang akan disusun nanti ada penambahan bagian dan ada penghapusan bagian. Hal tersebut diungkapkan oleh Sugianto, Bsc selaku Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka disimpulkan bahwa:

1. Setelah diidentifikasi tingkat kestrategisannya, ternyata isu yang paling strategis adalah meningkatkan kualitas SDM dengan adanya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum). Untuk menindak lanjuti

isu strategis tersebut PDAM Kabupaten Magetan harus melakukan upaya strategis yaitu menggunakan strategi Turnaround. Strategi Turnaround meliputi perumusan program-program strategis sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana umum pendidikan dan pelatihan untuk jangka menengah dan jangka panjang.
 - b. Menyusun kriteria yang obyektif dalam promosi jabatan dan jenjang.
 - c. Melakukan study banding dan kerja sama dengan PDAM lain yang lebih maju.
2. Melalui analisis faktor internal dan eksternal diperoleh analisis internal dengan kekuatan (adanya pedoman penilaian kerja, kondisi keuangan cukup baik, etos kerja pegawai cukup baik, serta team work pegawai relatif baik); kelemahan (struktur organisasi belum memadai, kondisi SDM belum memadai, sarana dan prasarana kurang memadai, aspek operasional belum optimal, serta aspek administrasi belum optimal); analisis eksternal dengan peluang (kondisi perekonomian masyarakat baik, minat masyarakat menjadi pelanggan tinggi, perkembangan teknologi informasi, curah hujan cukup tinggi, potensi jenis sumber air baku yang digunakan, adanya dukungan pemerintah, segmentasi pelanggan luas, serta adanya kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi swasta); ancaman (adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan kelestarian lingkungan sumber air menurun).
3. Hasil dari analisis SWOT terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang telah teridentifikasi, diperoleh beberapa isu strategis diurut dari yang paling strategis hingga isu yang kurang strategis yaitu:
- a. Isu meningkatkan kualitas SDM dengan adanya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) berada pada posisi Weaknesses dan Opportunities (WO) dan memiliki total nilai.
 - b. Isu strategis memperbaiki aspek operasional (tingkat kehilangan air dan cakupan pelayanan) untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap hak-hak konsumen berada pada posisi Weaknesses dan Threats (WT) dan memiliki total nilai 30.
 - 10 c. Isu strategis untuk mengembangkan perusahaan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi swasta berada pada posisi Strengths dan Opportunities (SO) dan memiliki nilai total 29.
 - d. Isu strategis meningkatkan aspek administrasi (SOP dan corporate plan) di lingkungan perusahaan dalam meraih segmentasi pelanggan yang luas berada pada posisi Weaknesses dan Opportunities (WO) dan memiliki total nilai 28.
 - e. Isu strategis mengoptimalkan sumber daya keuangan untuk menjaga kelestarian lingkungan sumber air berada pada posisi

Weaknesses dan Opportunities (WO) dan memiliki total nilai 25. f. Isu strategis meningkatkan sarana dan prasarana sesuai kemajuan IPTEK berada pada posisi Weaknesses dan Opportunities (WO) dan memiliki total nilai 24.

DAFTARPUSTAKA

- Akdon. 2007. Strategic Management: For Educational Management. Bandung: Alfabeta.
- Bryson, John M. 2005. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Hunger, J. David dan Thomas L. Wheelen. 2003. Manajemen Strategis. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Kaye, Jude and Michael Allison. 2005. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba. Jakarta. : Yayasan Obor Indonesia. Lexy J. Moleong. 2009.
- Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. H. Hadari Nawawi. 2005.
- ManajemenStrategikOrganisasiNonProfit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi Di Bidang Pendidikan. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Freddy Rangkuti.2006. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- H.B. Sutopo. 2002. Metode Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian). Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- J. Salusu.2004. Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. Jakarta: PTGramedia Widiasarana Indonesia.